AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i1.9040

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENDAMPINGAN NAGARI UNTUK PELAKSANAAN APLIKASI INDEKS DESA MEMBANGUN

Strategies of the West Sumatra Province Community and Village Empowerment Office in Assisting *Nagari* in the Implementation of the Village Development Index Application

Olivia Dwi Ruselda & Yulia Hanoselina
Universitas Negeri Padang
ruseldaolivia@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 26, 2025	Jan 19, 2026	Dec 31, 2026	Feb 5, 2026

Abstract

The *Indeks Desa Membangun* (IDM) is a strategic government instrument for measuring village independence and development based on social, economic, and environmental dimensions; however, the use of the IDM Application in West Sumatra Province still faces various challenges that affect data quality and the effectiveness of village development planning. This study aims to analyze strategies for improving the use of the *Indeks Desa Membangun* (IDM) Application and to identify the constraints encountered in its implementation at the Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. The research employed a qualitative approach with a descriptive method, involving purposively selected informants who understand and are directly involved in the management and implementation of IDM. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, then qualitatively analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

The findings show that efforts to enhance IDM have been pursued through technical assistance, capacity building for government apparatus, and optimization of digital systems, but these strategies have not yet functioned optimally. The main constraints include limited understanding among village officials, low participation of village governments and communities, gaps in information technology infrastructure, ineffective coordination across levels of government, and the predominantly administrative use of IDM data, which has not yet fully served as a basis for policy making. The study concludes that the success of strategies to strengthen the IDM Application requires enhanced human resource capacity, improved technological infrastructure, stronger institutional coordination, and the consolidation of IDM data utilization as the foundation for data-driven village development planning in West Sumatra Province.

Keywords: *Indeks Desa Membangun* (IDM); IDM Application; Improvement Strategies; Village Development; West Sumatra Province

Abstrak: *Indeks Desa Membangun (IDM)* merupakan instrumen strategis pemerintah untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemajuan desa berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, namun pemanfaatan Aplikasi IDM di Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada kualitas data dan efektivitas perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan penggunaan Aplikasi *Indeks Desa Membangun (IDM)* serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan informan yang ditentukan secara *purposive* dari pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan serta pelaksanaan IDM. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan IDM telah diupayakan melalui pendampingan teknis, penguatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi sistem digital, tetapi belum berjalan secara optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan pemahaman aparatur desa, rendahnya partisipasi pemerintah desa dan masyarakat, kesenjangan infrastruktur teknologi informasi, koordinasi antarlevel pemerintahan yang belum terbangun secara efektif, serta pemanfaatan data IDM yang masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjadi dasar pengambilan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan strategi peningkatan Aplikasi IDM menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur teknologi, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pemantapan pemanfaatan data IDM sebagai basis perencanaan pembangunan desa berbasis data di Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Indeks Desa Membangun; Aplikasi IDM; Strategi Peningkatan; Pembangunan Desa; Provinsi Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital dalam governansi

menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berbasis data. Pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga desa, dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan ini melalui pemanfaatan teknologi digital dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan (Sofyani et al., 2020). Digitalisasi pemerintahan atau e-Government menjadi instrumen strategis dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola publik. Implementasi e-Government di Indonesia secara resmi dimulai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, implementasi e-Government masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan infrastruktur digital dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan strategi kelembagaan dan penguatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan (Mariam & Kudus, 2022).

Dalam konteks pembangunan desa, transformasi digital diwujudkan melalui pengembangan sistem pengukuran dan pemantauan pembangunan berbasis teknologi informasi, salah satunya melalui Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan instrumen strategis yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara komprehensif dan terstandar secara nasional. IDM disusun sebagai indeks komposit yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi atau lingkungan (Sari & Oktavianor, 2021). Ketiga dimensi tersebut dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi objektif desa serta menjadi dasar dalam penentuan status desa, mulai dari desa sangat tertinggal hingga desa mandiri. Sebelum adanya IDM, pemetaan pembangunan desa cenderung bersifat parsial, sektoral, dan tidak terstandarisasi, sehingga menyulitkan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya secara tepat sasaran. Dengan berbasis aplikasi digital, IDM memungkinkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Regulasi terbaru yang mengatur IDM adalah Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, yang

memperkuat mekanisme pendataan berbasis digital serta memperluas cakupan indikator pembangunan desa.

Implementasi IDM di tingkat daerah sangat bergantung pada peran aktif pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 dan diperkuat melalui Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020, memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan IDM di seluruh wilayah provinsi. DPMD Provinsi Sumatera Barat bertugas melakukan fasilitasi, supervisi, verifikasi, dan validasi data IDM yang dihimpun dari desa dan kabupaten/kota. Selain itu, DPMD juga berperan dalam memberikan pelatihan kepada aparatur desa dan pendamping lokal desa agar mampu mengoperasikan aplikasi IDM secara benar dan berkualitas (Duwyna, 2021). Data IDM yang telah diverifikasi selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan Renstra OPD, sehingga IDM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan desa. Hingga saat ini, implementasi IDM di Sumatera Barat menunjukkan hasil yang cukup positif, ditandai dengan meningkatnya status nagari serta berkurangnya jumlah nagari tertinggal.

Meskipun demikian, pelaksanaan aplikasi Indeks Desa Membangun di Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi pemanfaatannya. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia aparatur desa dalam melakukan penginputan dan pemutakhiran data IDM secara mandiri dan akurat. Selain itu, masih terdapat ketimpangan infrastruktur digital, khususnya di daerah tertinggal, terpelosok, dan terujung, yang menyebabkan beberapa nagari mengalami keterbatasan akses internet atau bahkan berada dalam kondisi blind spot. Permasalahan lain yang cukup serius adalah terjadinya pembobolan data nasional yang berdampak pada validitas data IDM, sehingga desa harus melakukan pembersihan dan perbaikan data secara berulang. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat proses pemutakhiran data, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap sistem aplikasi IDM. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik di sejumlah desa turut memengaruhi efektivitas pembangunan desa secara keseluruhan. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan terencana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat untuk

meningkatkan penggunaan dan optimalisasi aplikasi Indeks Desa Membangun. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis strategi peningkatan penggunaan aplikasi IDM sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis data di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi peningkatan Aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis fenomena secara mendalam sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemahaman makna, proses, serta strategi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan penggunaan aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM). Menurut (Sugiyono, 2020), penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, fokus penelitian diarahkan pada strategi peningkatan penggunaan aplikasi IDM di lingkungan Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Pramuka No. 13 Padang, karena instansi tersebut merupakan pelaksana teknis dan koordinator utama pelaksanaan IDM di tingkat provinsi. Penentuan lokasi ini didasarkan pada relevansi lokasi dengan permasalahan penelitian serta ketersediaan data yang dibutuhkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti mampu memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi, tantangan, dan upaya peningkatan pemanfaatan aplikasi IDM.

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yaitu 20 Oktober sampai 20 November 2025. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan serta pengelolaan aplikasi Indeks Desa

Membangun. Informan penelitian meliputi Kepala Bidang, Kepala Seksi, serta Penelaah Teknis Kebijakan di lingkungan Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat. Teknik ini sejalan dengan pendapat (Iba & Wardhana, 2023)yang menyatakan bahwa purposive sampling digunakan untuk memperoleh data dari sumber yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta laporan yang berkaitan dengan IDM. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan studi dokumentasi. Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa panduan wawancara, buku catatan, alat perekam suara, dan kamera guna mendokumentasikan aktivitas penelitian di lapangan.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi, yang bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiyono, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan data hasil wawancara antar informan, triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi, serta triangulasi waktu dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan hingga penelitian selesai (Sugiyono, 2020). Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis interaktif Miles Huberman dalam (Annisa & Maliani, 2023), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan data pada hal-hal yang relevan dengan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis data dengan rumusan masalah penelitian mengenai strategi peningkatan penggunaan aplikasi Indeks Desa Membangun di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

HASIL

Pelaksanaan Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Sumatera Barat berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yang

berlokasi di Kota Padang. Dinas ini memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi pembangunan desa dan nagari di seluruh wilayah provinsi. Dalam struktur organisasinya, terdapat beberapa bidang yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan IDM, khususnya Bidang Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan (KPKP). Bidang ini berfungsi sebagai pengelola teknis pelaksanaan IDM, mulai dari sosialisasi kebijakan, pendampingan pengisian aplikasi, verifikasi data, hingga pelaporan hasil kepada pemerintah pusat. Peran ini menempatkan DPMD Provinsi Sumatera Barat sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa data IDM yang dihasilkan bersifat valid, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh DPMD menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan kualitas data dan status desa di Provinsi Sumatera Barat.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan desa, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pengukuran pembangunan desa, yaitu dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa implikasi substantif terhadap dimensi pengukuran, metode pengumpulan data, serta strategi pelaksanaan di tingkat daerah. Pada sistem IDM sebelumnya, pengukuran pembangunan desa didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan desa ke dalam lima kategori status, mulai dari desa sangat tertinggal hingga desa mandiri. Namun, dalam praktiknya, sistem ini dinilai belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas kondisi desa yang beragam, khususnya terkait aspek tata kelola pemerintahan desa dan aksesibilitas pelayanan publik.

Perubahan sistem tersebut ditunjukkan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2016 dan Indeks Desa Tahun 2024

No	Aspek Perbandingan	IDM (2016)	Indeks Desa (2024)
1	Tahun dan Regulasi	Diatur melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun	Diatur melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa
2	Terminologi	Menggunakan istilah *Indeks Desa Membangun (IDM)*	Menggunakan istilah *Indeks Desa*
3	Komponen Dimensi	Terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan	Terdiri dari 6 dimensi, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola

No	Aspek Perbandingan	IDM (2016)	Indeks Desa (2024)
4	Fokus Utama	Menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan klasifikasi status desa	Mengukur kondisi desa secara lebih holistik serta mengintegrasikan data desa lintas sektor
5	Implikasi Kebijakan	Digunakan sebagai dasar alokasi Dana Desa dan penetapan status perkembangan desa	

Tabel 1. perbandingan regulasi idm dan indeks desa, yang menggambarkan perbedaan mendasar antara sistem lama dan sistem baru. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Indeks Desa menggunakan enam dimensi pengukuran, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Penambahan dimensi tata kelola dan aksesibilitas memberikan ruang analisis yang lebih luas terhadap kapasitas pemerintahan desa dan keterjangkauan layanan publik. Selain itu, sistem Indeks Desa juga didukung oleh aplikasi digital yang lebih terintegrasi, sehingga proses penginputan dan pengolahan data menjadi lebih sistematis. Penjelasan tabel ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan menuntut adanya penyesuaian strategi di tingkat daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, maupun mekanisme pendampingan desa.

Dampak implementasi IDM di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat secara kuantitatif melalui tabel berikut:

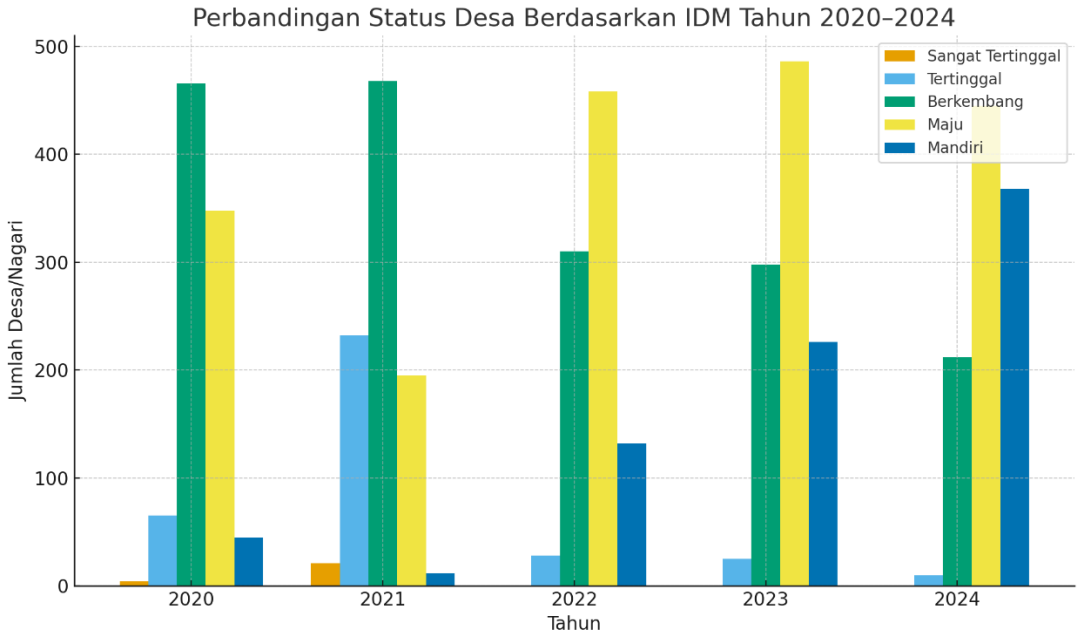
Tabel 2. Perbandingan Data IDM Tahun 2020-2024

Tahun	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
2020	4	65	466	348	45
2021	21	232	468	195	12
2022	0	28	310	458	132
2023	0	25	298	486	226
2024	0	10	212	445	368

Tabel 2 ini menunjukkan adanya dinamika status desa yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, masih terdapat desa dengan kategori sangat tertinggal, sementara jumlah desa mandiri masih relatif terbatas. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan jumlah desa sangat tertinggal hingga akhirnya tidak ditemukan lagi pada periode 2022–2024. Secara bersamaan, jumlah desa maju dan desa mandiri mengalami

peningkatan yang cukup tajam. Penjelasan tabel ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas data IDM dan intervensi pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap status pembangunan desa di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memperjelas tren perubahan status desa tersebut, data pada tabel divisualisasikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Perbandingan Data IDM Tahun 2020-2024

Gambar ini memperlihatkan kecenderungan meningkatnya jumlah desa maju dan desa mandiri dari tahun ke tahun. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa penurunan jumlah desa berkembang tidak selalu menunjukkan kemunduran, melainkan mengindikasikan adanya pergeseran status desa ke kategori yang lebih tinggi. Penjelasan gambar ini memperkuat temuan bahwa arah kebijakan pembangunan desa di Provinsi Sumatera Barat telah berorientasi pada peningkatan kemandirian desa secara berkelanjutan. Visualisasi data ini juga memudahkan pembaca dalam memahami capaian kinerja DPMD dalam mendorong peningkatan status desa melalui pemanfaatan aplikasi IDM.

Hasil wawancara dengan informan kunci di DPMD Sumbar memperkuat temuan tersebut. Kepala Bidang Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan (KPKP), **Vera Irawati, S.T., M.M.**, menyatakan bahwa

"Perubahan dari IDM menjadi Indeks Desa merupakan penyederhanaan sekaligus penguatan konsep pengukuran pembangunan desa. Dimensi pengukuran yang semula hanya tiga kini diperluas menjadi

enam agar lebih relevan dengan kondisi riil di lapangan dan memudahkan pemerintah daerah dalam evaluasi pembangunan desa."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dipahami sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas data dan efektivitas perencanaan pembangunan desa. Para informan menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan status desa tidak terlepas dari strategi yang diterapkan oleh DPMD Provinsi Sumatera Barat. Kepala Bidang KPKP menyampaikan bahwa perubahan sistem IDM menuntut aparatur daerah untuk lebih aktif dalam melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah desa, terutama dalam pengisian dan pemutakhiran data.

Selain itu, pihak DPMD juga melakukan pelatihan berkala bagi aparatur desa dan pendamping desa agar memahami indikator-indikator yang dinilai dalam IDM. Salah satu informan menyatakan bahwa peningkatan kualitas data menjadi prioritas utama, karena data IDM tidak hanya digunakan untuk penilaian status desa, tetapi juga menjadi dasar perencanaan program pembangunan dan alokasi anggaran. Pernyataan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan IDM tidak hanya berfokus pada aspek teknis aplikasi, tetapi juga pada pemahaman substansi pembangunan desa.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan IDM di Provinsi Sumatera Barat. Kendala tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa wilayah, perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar desa, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan data. Kondisi geografis yang sulit dijangkau juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendampingan dan verifikasi data. Beberapa informan mengungkapkan bahwa masih terdapat desa yang mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan internet, sehingga penginputan data IDM tidak dapat dilakukan secara optimal. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa peningkatan aplikasi IDM memerlukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah.

Berdasarkan hasil analisis, strategi peningkatan aplikasi IDM di DPMD Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa langkah utama. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Kedua, penguatan sistem pendampingan desa dengan melibatkan pendamping profesional dan aparatur daerah. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyempurnaan aplikasi dan dukungan infrastruktur. Keempat, peningkatan koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah lain maupun pemerintah kabupaten/kota.

Kelima, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas data dan efektivitas strategi yang diterapkan. Strategi-strategi ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi IDM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan aplikasi IDM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan status pembangunan desa. Keberhasilan tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri serta menurunnya desa tertinggal. Namun, keberlanjutan capaian ini sangat bergantung pada konsistensi pendampingan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan infrastruktur pendukung.

PEMBAHASAN

Strategi Peningkatan Penggunaan Aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat

Strategi peningkatan penggunaan Aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dianalisis menggunakan kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh empat konstruk utama, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating conditions (Williams et al., 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat konstruk UTAUT tersebut berperan secara signifikan dalam membentuk perilaku penggunaan aplikasi IDM. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan organisasi. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menilai keberhasilan penggunaan IDM, tetapi juga mengkaji faktor-faktor strategis yang memengaruhi keberlanjutannya. Analisis ini menjadi penting karena IDM berfungsi sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap faktor penerimaan teknologi menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan penggunaan IDM secara berkelanjutan.

Dari aspek *performance expectancy*, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur dan operator desa memiliki persepsi yang positif terhadap manfaat aplikasi IDM dalam meningkatkan kinerja mereka. Aplikasi IDM dipandang mampu menyediakan data pembangunan desa secara cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mempermudah proses

perencanaan dan pelaporan pembangunan desa. Temuan ini sejalan dengan konsep performance expectancy dalam teori UTAUT yang menekankan keyakinan pengguna bahwa teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaan (Williams et al., 2015). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa persepsi manfaat kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap niat penggunaan sistem informasi di sektor publik (Sakawati & Yamin, 2024). Dalam konteks Dinas PMD Sumatera Barat, data IDM digunakan sebagai dasar pemetaan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan desa, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa IDM tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan. Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa sebagian aparatur masih memandang IDM sebagai kewajiban pelaporan semata. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun performance expectancy relatif tinggi, optimalisasi pemanfaatan data IDM masih memerlukan penguatan persepsi manfaat kinerja secara berkelanjutan.

Aspek *effort expectancy* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan aplikasi IDM meningkat seiring dengan adanya pelatihan dan pendampingan teknis yang dilakukan oleh Dinas PMD. Pada tahap awal implementasi, beberapa operator desa mengalami kesulitan dalam memahami alur pengisian data dan indikator penilaian IDM. Namun, setelah memperoleh bimbingan teknis secara berkelanjutan, aplikasi IDM dipersepsikan lebih mudah digunakan dan tidak lagi dianggap sebagai beban kerja tambahan. Temuan ini sejalan dengan teori UTAUT yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh langsung terhadap penerimaan teknologi, terutama pada tahap awal adopsi (Williams et al., 2015). Penelitian (Apriliana & Nawangsari, 2021) mendukung terkait hal diatas yang menunjukkan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM berperan penting dalam meningkatkan effort expectancy pengguna sistem informasi pemerintahan. Dalam konteks ini, strategi Dinas PMD dalam menyelenggarakan bimtek secara rutin terbukti efektif dalam menurunkan hambatan teknis yang dirasakan pengguna. Dengan meningkatnya effort expectancy, resistensi terhadap penggunaan IDM berkurang dan konsistensi penginputan data menjadi lebih terjaga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci utama dalam memperkuat persepsi kemudahan penggunaan aplikasi IDM.

Selanjutnya, *social influence* terbukti menjadi faktor yang sangat dominan dalam mendorong penggunaan aplikasi IDM di lingkungan Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh sosial muncul melalui kebijakan pimpinan, instruksi Gubernur, serta arahan kementerian yang menempatkan IDM sebagai indikator keberhasilan pembangunan desa.

Struktur birokrasi yang hierarkis membuat aparatur cenderung mematuhi arahan atasan sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan. Temuan ini sejalan dengan teori UTAUT yang menyatakan bahwa tekanan sosial dan norma subjektif memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi teknologi, khususnya dalam organisasi formal (Williams et al., 2015). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa dukungan pimpinan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi di sektor publik (Putri & Ratnaningsih, 2024). Selain itu, dukungan antarpegawai dan peran aktif kepala bidang turut membentuk norma sosial internal bahwa penggunaan IDM merupakan praktik kerja yang wajib dan wajar. Kondisi ini memperkuat komitmen aparatur dalam menggunakan aplikasi IDM secara konsisten. Dengan demikian, social influence berfungsi sebagai mekanisme penguat dalam strategi peningkatan penggunaan IDM.

Aspek *facilitating conditions* menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dan dukungan teknis masih menjadi tantangan dalam implementasi aplikasi IDM. Kendala seperti gangguan jaringan internet, keterbatasan perangkat, dan keterlambatan server masih dirasakan di beberapa wilayah desa. Kondisi ini sejalan dengan konsep facilitating conditions dalam teori UTAUT yang menekankan pentingnya kesiapan lingkungan dalam mendukung penggunaan teknologi (Chinniah & Tengku Anuar, 2025). Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur digital menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem informasi pemerintahan di daerah (Yasin & Ahkam, 2023). Meskipun demikian, Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat telah mengambil langkah strategis melalui kerja sama dengan Dinas Kominfo dan perbaikan sistem secara berkala. Selain itu, monitoring dan evaluasi lapangan menjadi bentuk dukungan non-teknis yang memperkuat penerapan IDM. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam meningkatkan kondisi pendukung penggunaan sistem. Namun, peningkatan infrastruktur digital di tingkat desa tetap menjadi agenda strategis yang perlu diprioritaskan.

Adapun analisis terhadap tabel di hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat konstruk UTAUT saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam mendukung strategi peningkatan penggunaan IDM. Performance expectancy mendorong aparatur untuk memanfaatkan IDM karena manfaat kinerja yang dirasakan. Effort expectancy menurunkan hambatan penggunaan melalui peningkatan kapasitas SDM. Social influence memperkuat komitmen penggunaan melalui kebijakan dan dukungan pimpinan. Facilitating conditions memastikan keberlanjutan penggunaan melalui dukungan infrastruktur dan teknis. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi

sistem informasi sangat ditentukan oleh sinergi antara faktor individu, sosial, dan organisasi (Tiwi & Khaira, 2020). Dengan demikian, strategi peningkatan penggunaan IDM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat komprehensif. Pendekatan yang hanya menekankan pada aspek teknis tanpa memperhatikan faktor sosial dan persepsi pengguna berpotensi menghasilkan implementasi yang tidak optimal. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan penggunaan aplikasi IDM di Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat telah berjalan secara efektif dengan memanfaatkan keempat dimensi utama teori UTAUT. Persepsi manfaat kinerja, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan dukungan fasilitas secara bersama-sama membentuk perilaku penggunaan teknologi di lingkungan birokrasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa teori UTAUT relevan digunakan dalam menganalisis adopsi teknologi di sektor publik (Nursasotyosidi, 2025).

Kendala dalam Strategi Peningkatan Aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas Aparatur Desa

Kendala utama dalam strategi peningkatan penggunaan Aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat adalah keterbatasan pemahaman dan kapasitas aparatur desa. Masih terdapat aparatur yang belum memahami secara menyeluruh indikator, variabel, serta mekanisme pengisian data IDM sesuai pedoman yang ditetapkan. Kondisi ini menyebabkan kesalahan penginputan data, ketidaksesuaian antara kondisi riil desa dengan data yang dilaporkan, serta keterlambatan dalam penyampaian laporan. Dampak dari permasalahan tersebut adalah menurunnya kualitas dan validitas data IDM yang digunakan sebagai dasar pengukuran tingkat kemandirian desa. Penelitian (Mufida et al., 2025) mendukung hal ini n bahwa rendahnya literasi data dan kapasitas SDM aparatur desa menjadi faktor utama lemahnya implementasi sistem informasi pembangunan desa. Aparatur desa yang belum terbiasa dengan sistem digital cenderung memandang aplikasi hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat analisis pembangunan. Akibatnya, potensi IDM sebagai instrumen strategis belum dimanfaatkan secara optimal. Maka itu, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi prasyarat utama dalam memperkuat strategi peningkatan penggunaan IDM.

Selain keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya partisipasi pemerintah desa dan masyarakat juga menjadi kendala signifikan dalam strategi peningkatan aplikasi IDM. Partisipasi yang rendah terlihat pada minimnya keterlibatan perangkat desa dan masyarakat dalam proses pengumpulan, validasi, serta pembaruan data. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi mengenai fungsi strategis IDM serta rendahnya kesadaran akan pentingnya data sebagai dasar perencanaan pembangunan desa. Beberapa pihak masih memandang IDM sebatas instrumen pelaporan administratif yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian sebelumnya seperti (Islam & Eriyanti, 2024) menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi pembangunan sangat bergantung pada tingkat partisipasi aktor lokal dan masyarakat sebagai sumber utama data. Tanpa partisipasi aktif, data yang dihasilkan berpotensi bias dan tidak mencerminkan kondisi riil desa. Rendahnya partisipasi ini juga berdampak pada lemahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil IDM. Dengan demikian, peningkatan partisipasi menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan strategi IDM.

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi kendala serius dalam implementasi strategi peningkatan penggunaan aplikasi IDM. Sebagian desa di Provinsi Sumatera Barat, khususnya wilayah terpencil dan dengan kondisi geografis sulit, masih menghadapi akses jaringan internet yang tidak stabil. Selain itu, ketersediaan perangkat pendukung seperti komputer dan sarana digital lainnya masih terbatas. Kondisi ini menghambat proses penginputan data secara tepat waktu dan berkelanjutan. Ketimpangan infrastruktur digital menjadi salah satu faktor utama kesenjangan implementasi e-government di daerah (Bangsawan, 2023). Aparatur desa yang menghadapi kendala teknis cenderung menunda atau mengabaikan pengisian aplikasi IDM. Akibatnya, konsistensi dan kontinuitas data menjadi terganggu. Maka karena itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi menjadi hambatan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan lintas sektor.

Kesenjangan pembangunan antarwilayah desa juga memengaruhi efektivitas strategi peningkatan aplikasi IDM. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar menyebabkan capaian indikator IDM antar desa menjadi tidak merata. Beberapa desa mengalami kesulitan meningkatkan status IDM meskipun telah melakukan penginputan data sesuai ketentuan. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan aparatur desa, karena upaya administratif tidak selalu diiringi dengan peningkatan status desa. Hal ini sejalan dengan penelitian (Aziza & Srimarchea, 2023) bahwa wilayah dengan keterbatasan sumber daya cenderung tertinggal dalam indikator pembangunan berbasis indeks. Kesenjangan ini

juga berpotensi menurunkan motivasi aparatur desa dalam memanfaatkan IDM secara optimal. IDM pada akhirnya dipersepsikan sebagai alat evaluasi yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks lokal desa. Maka dari itu, kesenjangan pembangunan menjadi tantangan substantif dalam strategi peningkatan penggunaan IDM (Ekawati et al., 2022).

Kendala lainnya adalah koordinasi antarlevel pemerintahan yang belum berjalan optimal. Koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi hambatan komunikasi dan integrasi data. Perbedaan pemahaman teknis dan substansi IDM sering menyebabkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, keterlambatan penyampaian informasi dan perubahan kebijakan teknis yang tidak tersosialisasi secara merata memperburuk kondisi koordinasi. Hal ini menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi faktor penghambat utama implementasi kebijakan berbasis data. Maka tidak heran jika dalam penelitian (Herawati et al., 2022) bahwa koordinasi antara lembaga menjadi salah satu kunci dalam kemajuan lembaga termasuk pemerintah. Tanpa koordinasi yang efektif, proses validasi dan pemanfaatan data IDM menjadi tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan IDM memerlukan tata kelola koordinasi yang lebih terintegrasi (Lantemona et al., 2018). Dengan demikian, penguatan mekanisme koordinasi lintas level pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak.

Terakhir, pemanfaatan data IDM yang belum optimal menjadi kendala fundamental dalam strategi peningkatan aplikasi IDM. Data yang telah dikumpulkan melalui aplikasi IDM belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan desa. Dalam praktiknya, IDM masih lebih sering digunakan sebagai alat pelaporan daripada instrumen pengambilan kebijakan strategis. Penelitian (Sukarno, 2020) dan (Imanda, 2015) menunjukkan bahwa banyak sistem informasi publik gagal memberikan dampak signifikan karena data yang dihasilkan tidak diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini juga terjadi pada IDM, di mana hasil pengukuran belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi program pembangunan yang tepat sasaran. Akibatnya, potensi IDM sebagai alat evidence-based policy belum tercapai secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan IDM tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada budaya pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan data IDM menjadi agenda penting dalam strategi peningkatan aplikasi IDM di Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai strategi peningkatan Aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM) serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan penggunaan IDM telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Strategi yang diterapkan telah mencakup penguatan kapasitas aparatur desa, pendampingan teknis, serta pemanfaatan sistem digital sebagai basis pengelolaan data pembangunan desa. Namun demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural, seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa, rendahnya partisipasi pemerintah desa dan masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di sejumlah wilayah. Selain itu, kesenjangan pembangunan antarwilayah desa turut memengaruhi capaian indikator IDM, sehingga tidak semua desa mampu meningkatkan statusnya secara merata. Koordinasi antarlevel pemerintahan yang belum optimal juga berdampak pada sinkronisasi kebijakan dan pemanfaatan data IDM. Data IDM yang dihasilkan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi IDM tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan, tata kelola pemerintahan, dan budaya pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, keberhasilan strategi peningkatan aplikasi IDM sangat ditentukan oleh sinergi antara aspek sumber daya manusia, infrastruktur, koordinasi kelembagaan, dan pemanfaatan data secara strategis. Secara keseluruhan, IDM memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan desa berbasis data, namun masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek pendukung agar dapat berfungsi secara optimal.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting secara akademik dan praktis dalam kajian pembangunan desa, khususnya terkait pemanfaatan sistem informasi pembangunan berbasis indeks. Secara akademik, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu administrasi publik dan kebijakan publik dengan memberikan gambaran empiris mengenai strategi dan kendala implementasi Aplikasi Indeks Desa Membangun di tingkat provinsi. Penelitian ini juga memberikan pemahaman mendalam mengenai keterkaitan antara kapasitas aparatur, koordinasi kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas sistem digital dalam pembangunan desa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam menyempurnakan strategi peningkatan penggunaan IDM. Temuan penelitian ini juga dapat

dijadikan acuan bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam implementasi IDM. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya menjadikan data IDM sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong penguatan tata kelola pembangunan desa yang berbasis data dan bukti empiris.

Rekomendasi penelitian selanjutnya 1) Memperluas cakupan kajian dengan melibatkan perspektif pemerintah desa dan masyarakat sebagai pengguna langsung dan sumber utama data IDM. 2) Menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur secara lebih objektif pengaruh penggunaan IDM terhadap peningkatan status dan kemandirian desa. 3) Memfokuskan kajian pada efektivitas program pelatihan dan pendampingan aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pengisian dan pemanfaatan data IDM. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, I. S., & Mailani, E. (2023). Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Siswa dalam Pembelajaran Tematik dengan Menggunakan Metode Miles dan Huberman di Kelas IV SD Negeri 060800 Medan Area. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *3*(2), 6460–6477. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1130

Apriliana, S. D., & Nawangsari, E. R. (2021). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi. *Forum Ekonomi*, *23*(4), 804–812. https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10155

Aziza, T. N., & Srimarchea, D. W. (2023). Penanganan Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Khazanah Intelektual*, *7*(1), 1584–1600. https://doi.org/10.37250/khazanah.v7i1.185

Bangsawan, G. (2023). Policy for accelerating digital transformation in Indonesia: The prospects and challenges of developing the creative economy. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, *2*(1), 27–40. https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40

Chinniah, S. R., & Tengku Anuar, T. F. (2025). Analysis on the influence of place branding strategies on rural tourism: A unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) approach—A case study of Kampung Agong. *International Journal of Creative Future and Heritage (TENIAT)*, *13*(1), 28–38. https://doi.org/10.47252/teniat.v13i1.1314

Duwyna, A. (2021). *Dukungan Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Studi terhadap Badan Usaha Milik Nagari Zigiran Mandiri, Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota)* [Thesis, Universitas Andalas]. http://scholar.unand.ac.id/74211/

Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). *Jurnal Kebijakan Publik*, *13*(2), 185–192. https://doi.org/10.31258/jkp.v13i2.8005

Herawati, P., Utami, S. B., & Karlina, N. (2022). Analisis Bibliometrik: Perkembangan Penelitian dan Publikasi Mengenai Koordinasi Program Menggunakan Vosviewer. *Jurnal Pustaka Budaya*, *9*(1), 1–8. https://doi.org/10.31849/pb.v9i1.8599

Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian* (1st ed.). CV. Eureka Media Aksara.

Imanda, A. (2015). Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, *1*(2), 118–123. https://doi.org/10.37676/professional.v1i2.133

Islam, A., & Eriyanti, F. (2024). Peran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam Pemberdayaan Industri Kecil Masyarakat (IKM) di Desa Balai Batu Sandaran. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *5*(2), 12. https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.134

Lantemona, G. H., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2018). Koordinasi Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, *1*(1), 13–34. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20717

Mariam, M., & Kudus, I. (2022). Analisis Penerapan Electronic Government (E-Gov) di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. *Neo Politea*, *3*(2), 39–50. https://journal2.unfari.ac.id/index.php/neopolitea/article/view/1081

Mufida, K., Mafasy, N. R., Nurfatimah, G., Ramadana, S., Urifah, S. N., Yudhistira, P., & Ardhiarisca, O. (2025). Kapasitas SDM dan Literasi Aparatur sebagai Penentu Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa: Studi di Desa Plalangan. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, *2*(4), 85–92. https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7135

Nursasotyosidi, A. B. (2026). Mengelola Inovasi di Sektor Publik Indonesia: Tinjauan Literatur dan Pengembangan Model UTAUT-IPS. *Journal of Governance Innovation*, *7*(2), 540–560. https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i2.6896

Putri, M. B., & Ratnaningsih, S. (2024). Peran Etos Kerja Pimpinan dan Gaya Kepemimpinan Berbasis Kewirausahaan terhadap Kemandirian Unit Usaha Pesantren Darunnajah. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*, *8*(2), 26–35. https://doi.org/10.37012/jipmht.v8i2.2358

Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Analisis Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Journal Governance and Politics*, *4*(1), 49–61. https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/389

Sari, N., & Oktavianor, T. (2020). Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, *2*(1), 36–42. https://doi.org/10.20527/jpp.v2i1.2768

Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pemerintah Daerah. *JIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(2), 325–359. https://doi.org/10.23887/jia.v5i2.29053

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Sukarno, M. (2020). Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM) (Studi Kasus: Desa Ponggok, Kecamatan Palohharjo, Kabupaten Klaten). *Edusaintek*, *4*(1), 1–17. https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/edusaintek/article/view/596

Tiwi, D. D., & Khaira, N. (2020). Evaluasi Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kuliah Kerja Nyata Menggunakan Metode Hot Fit. *Jurnal Ilmiah Rekayasa*

dan Manajemen Sistem Informasi, *6*(1), 100–108. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/view/8749

Williams, M. D., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2015). The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT): A literature review. *Journal of Enterprise Information Management*, *28*(3), 443–458. https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2014-0088

Yasin, M., & Ahkam, A. (2023). Evaluasi Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah dalam Implementasi Smart City. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, *5*(1), 45–58.